



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS SEBELAS MARET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SARWANTO**
2. Jabatan : **KETUA**
3. NHK : **640165**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.545.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Tanah Seluas 1.910 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, Rp. 50.000.000
5. Tanah Seluas 329 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 69 m2/55 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 341 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 78.500.000**



1. MOBIL, KIA PICANTO MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 27.500.000
2. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOTOR, REVO X SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	733.474.237
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.356.974.237
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.356.974.237

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.